

# Inefisiensi Anggaran dan Masalah Integritas Pejabat Publik

Pidato Semesteran  
15 Mar 2012

Dr. Wahyudi Kumorotomo

Jurusan Manajemen dan Kebijakan Publik  
Fisipol  
Universitas Gadjah Mada

[www.kumoro.staff.ugm.ac.id](http://www.kumoro.staff.ugm.ac.id)

081 328 488 444

# Penyebab Inefisiensi Anggaran Publik di Indonesia

1. Kebocoran & korupsi anggaran terjadi di kedua sisi: pendapatan (*revenues*) dan belanja (*expenditure*).
2. Ekonomi tumbuh (prediksi 2012: 6,3%), tetapi bukan karena didukung anggaran pemerintah.
3. Mekanisme APBN dan APBD tidak sinkron.
4. Peran anggaran dalam peningkatan kesejahteraan rakyat semakin turun.
5. Sebagian besar anggaran publik tersedot untuk biaya operasional birokrasi (gaji, pengeluaran rutin).
6. Prioritas pembangunan belum menyentuh kebutuhan dasar rakyat.
7. Daya serap anggaran turun, sisa anggaran tidak dapat dipergunakan, akuntabilitas anggaran rendah.

# Bocor Sebelum Masuk Anggaran

- Rp 300 triliun per th uang pajak yang dibayar rakyat digerogeti mafia pajak.
- Daniel Kaufmann: “Penyuapan dalam sistem peradilan di Indonesia lebih tinggi ketimbang negara-negara yang dikuasai oleh agen / mafia narkoba atau bekas negara komunis”.
- Kasubdit Investigasi Pajak (Darussalam): Total berkas kasus yang harus diselesaikan th 2011 ada 14.208 kasus. “Hasil sidang di pengadilan pajak tidak bisa diakses umum atas alasan kerahasiaan wajib pajak” → rawan penyimpangan & penyalahgunaan.
- Kasus Gayus: Yang disidik baru 4 perusahaan (PT Surya Alam Tunggal Sidoarjo, PT Dowell Anadrill Schlumberger, PT Exelcomindo, dan PT Indocement Tunggal Prakasa). Bgm dg 149 perusahaan yg “digarap” Gayus?

# Personil Mafia Pajak



Gayus



Bahasyim



Dhana

## Fakta:

- Target penerimaan pajak dlm APBN 2012: Rp 1.019 triliun.
- ICW: Rp 300 triliun dari potensi pajak bocor.
- Pengadilan pajak (periode 2002-2009): 22.105 perkara; wajib pajak memenangi 61% perkara. Apa artinya?
- Selama 10 tahun terakhir, rerata tax coverage hanya 65%, tax effort th 2011 hanya 13,3% thd PDB (terendah di ASEAN).

# Mafia Pajak Melibatkan Semua Level

- Th 2008, Ditjen pajak melakukan pemeriksaan dan ditemukan dugaan rekayasa pajak sebesar Rp. 2,1 triliun atas tiga perusahaan Bakrie . Mereka terdiri dari PT Kaltim Prima Coal ( KPC ) sebesar Rp 1,5 triliun, PT Arutmin Indonesia sebesar US\$ 30,9 juta dan PT. Bumi sebesar Rp. 376 milyar.



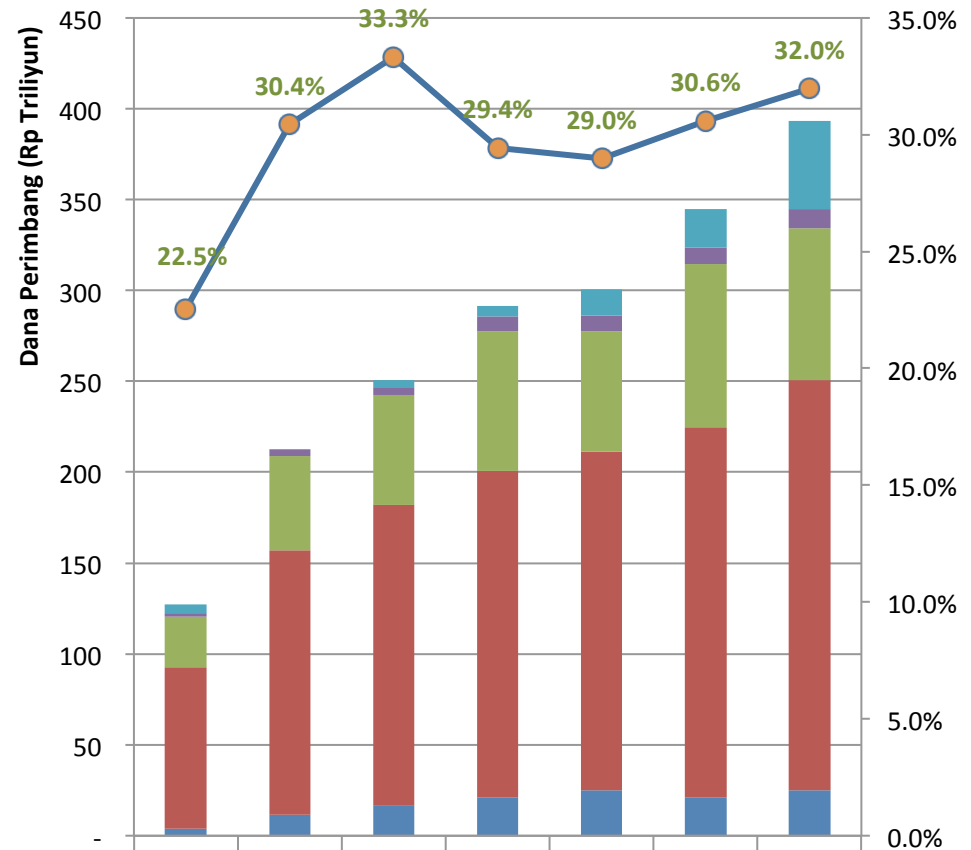
- Siswanto, tukang sapu KKP Gubeng, Surabaya; Punya Innova dan 3 rumah mewah, pendapatan Rp 50 jt. → Terlibat pemalsuan faktur pajak.

# Bocor Ketika Keluar dari Anggaran

- Korupsi politik: melibatkan politisi di DPR, Kementerian, Parpol, pejabat Pemda dan DPRD.
- Dana APBN banyak digunakan untuk kepentingan Parpol, digerogoti untuk berbagai macam “fee”, tidak fokus pada kebutuhan rakyat.
- Biaya birokrasi semakin membengkak, belanja modal untuk kepentingan publik menyusut.
- Dana APBD banyak digunakan untuk politik uang pejabat petahana, biaya prosedural politik yg mahal, untuk dana taktis KDH, dsb.

# Dana Penyesuaian = “Gentong Babi”

- Alokasi dana “gentong babi” (*pork barrel*) dikritik habis-habisan oleh publik pada th 2005. Tapi DPR tetap jalan terus dg berbagai alasan.
- Pada TA 2012, Dana Penyesuaian mencapai Rp 58,4 triliun sedangkan DAK hanya Rp 26,1 triliun.



	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Dana Penyesuaian	4,703	301	4,362	5,806	14,490.0	21,150.0	48,235
Otsus	1,775	3,488	4,046	8,180	8,857	9,099.6	10,421
DBH	27,977	51,638	60,502	76,585	66,073	89,618	83,558
DAU	88,766	145,664	164,787	179,507	186,414	203,607	225,533
DAK	4,014	11,570	17,048	21,202	24,820	21,138.4	25,233
—●— % Dana Perimbangan Thd APBN	22.5%	30.4%	33.3%	29.4%	29.0%	30.6%	32.0%



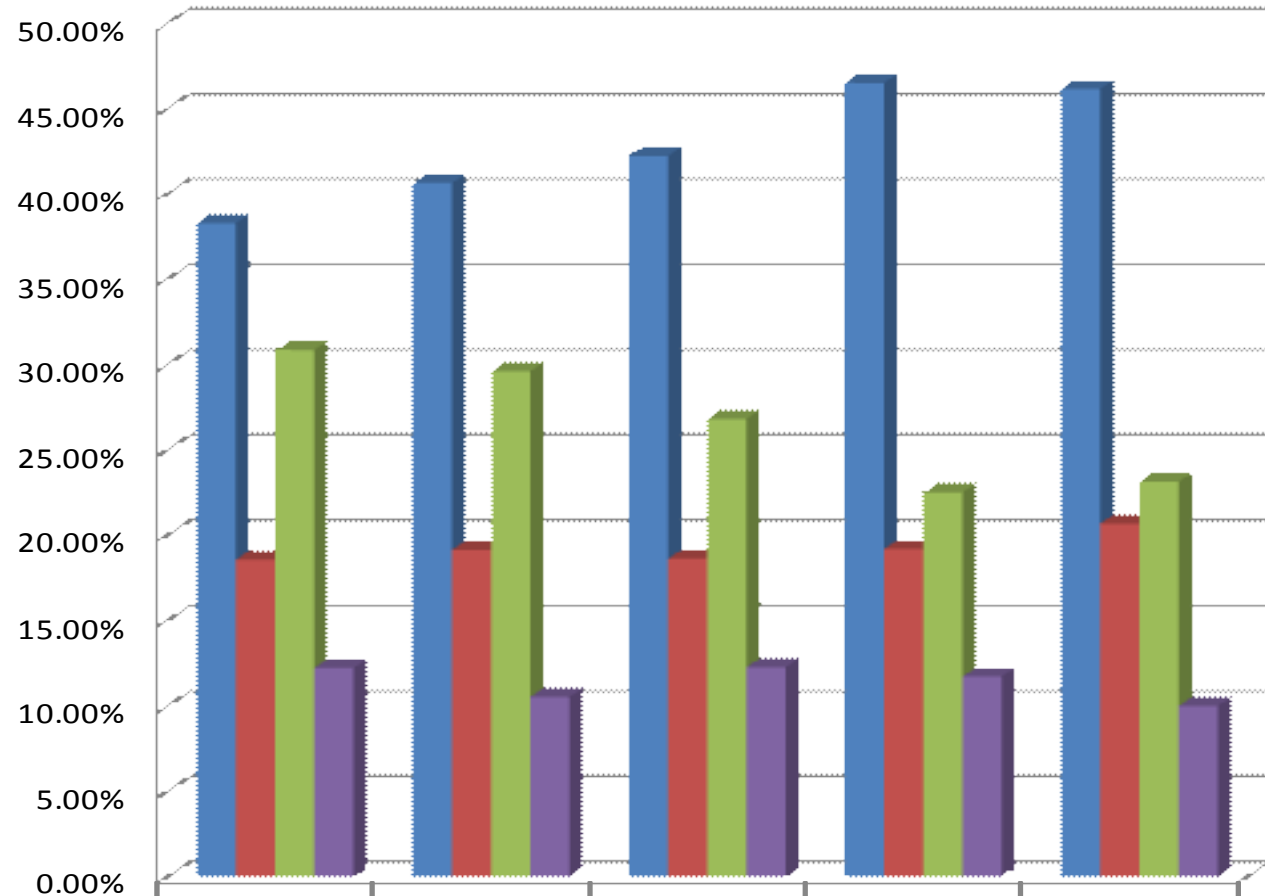




# Trend Komposisi Belanja Daerah

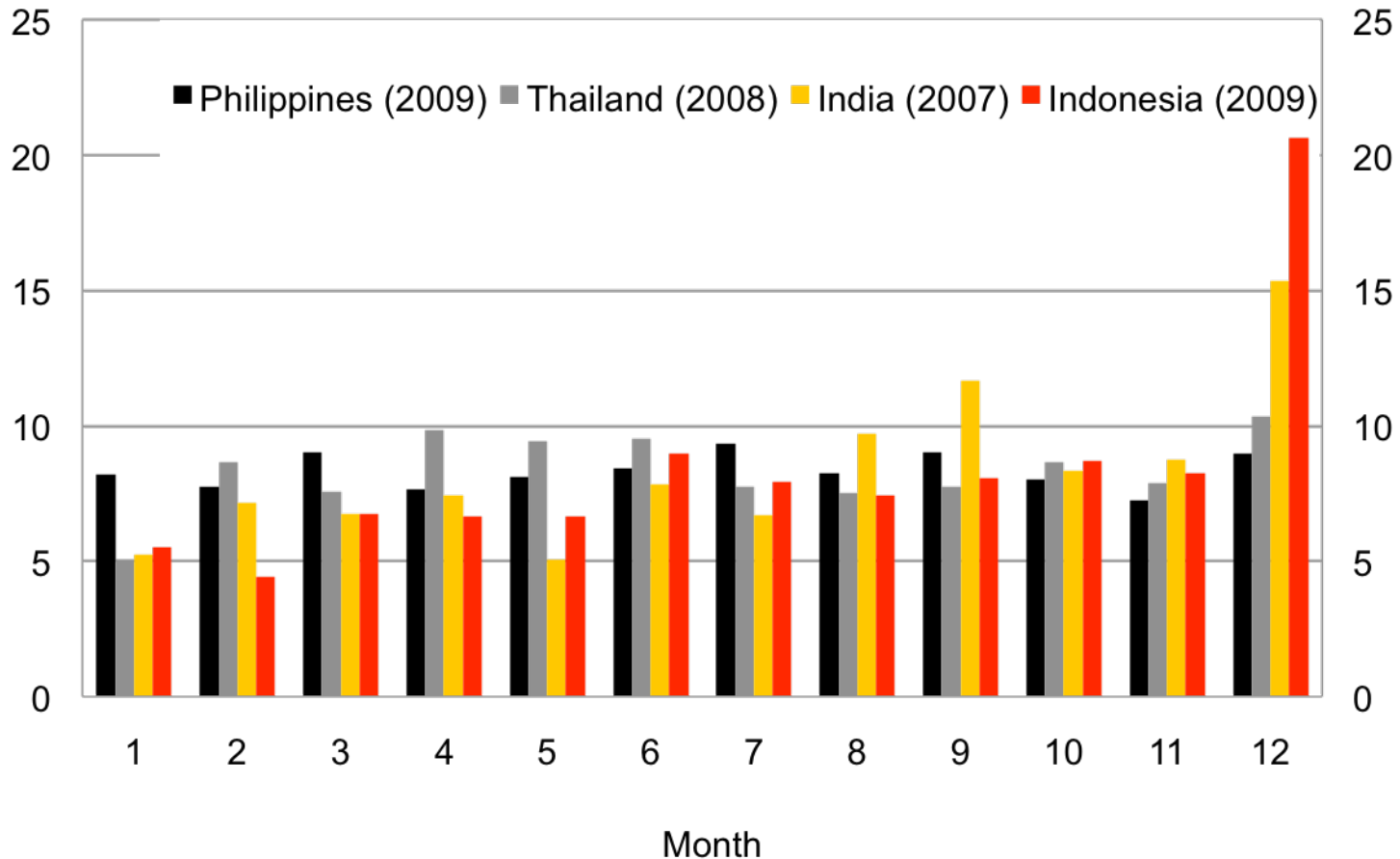
Note: data APBD konsolidasi secara nasional

- Porsi belanja modal mengalami trend menurun selama 2007-2011. Pada tahun 2011, porsi belanja modal terhadap total belanja hanya mencapai 20,7%.



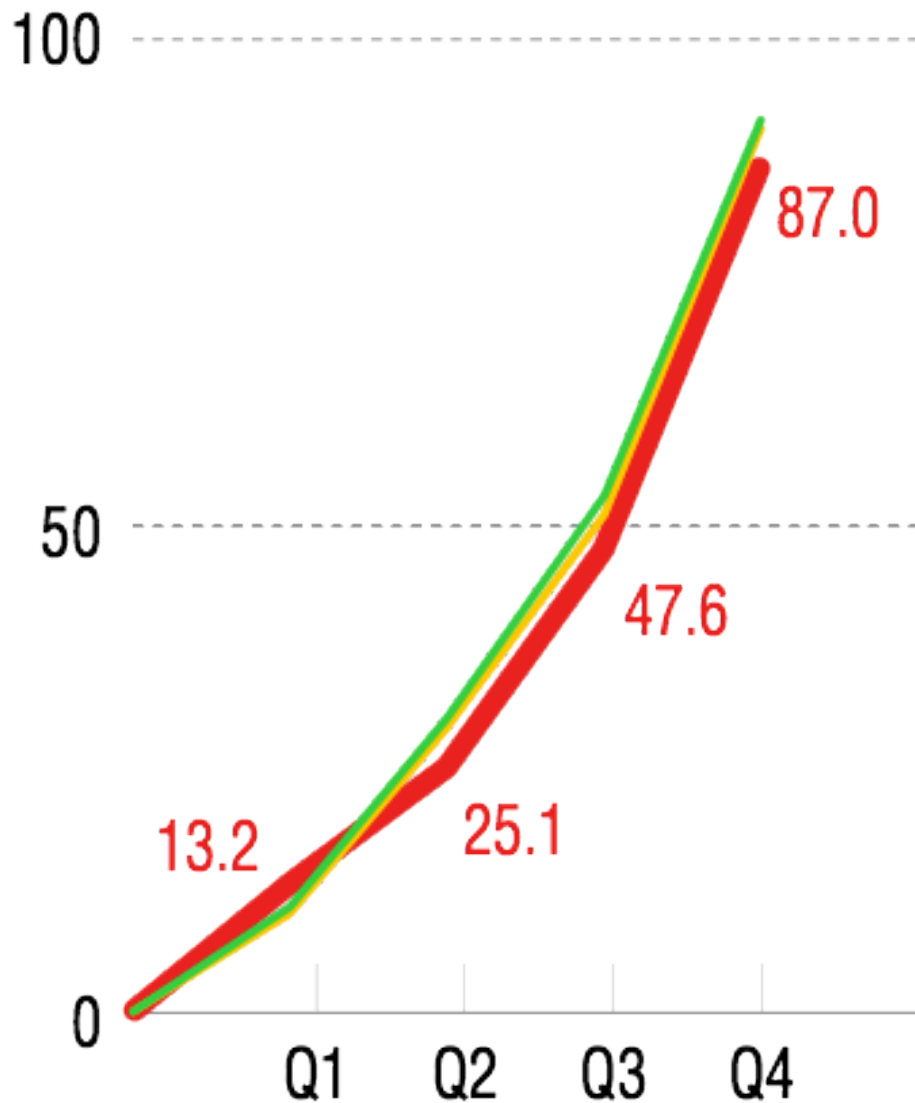
	2007	2008	2009	2010	2011
Belanja Pegawai	38.29%	40.65%	42.25%	46.52%	46.16%
Belanja Barang dan jasa	18.58%	19.16%	18.64%	19.21%	20.69%
Belanja Modal	30.87%	29.63%	26.83%	22.53%	23.14%
Belanja Lainnya	12.25%	10.55%	12.29%	11.74%	10.01%

# Penyerapan DIPA lebih Lambat dari Negara Lain



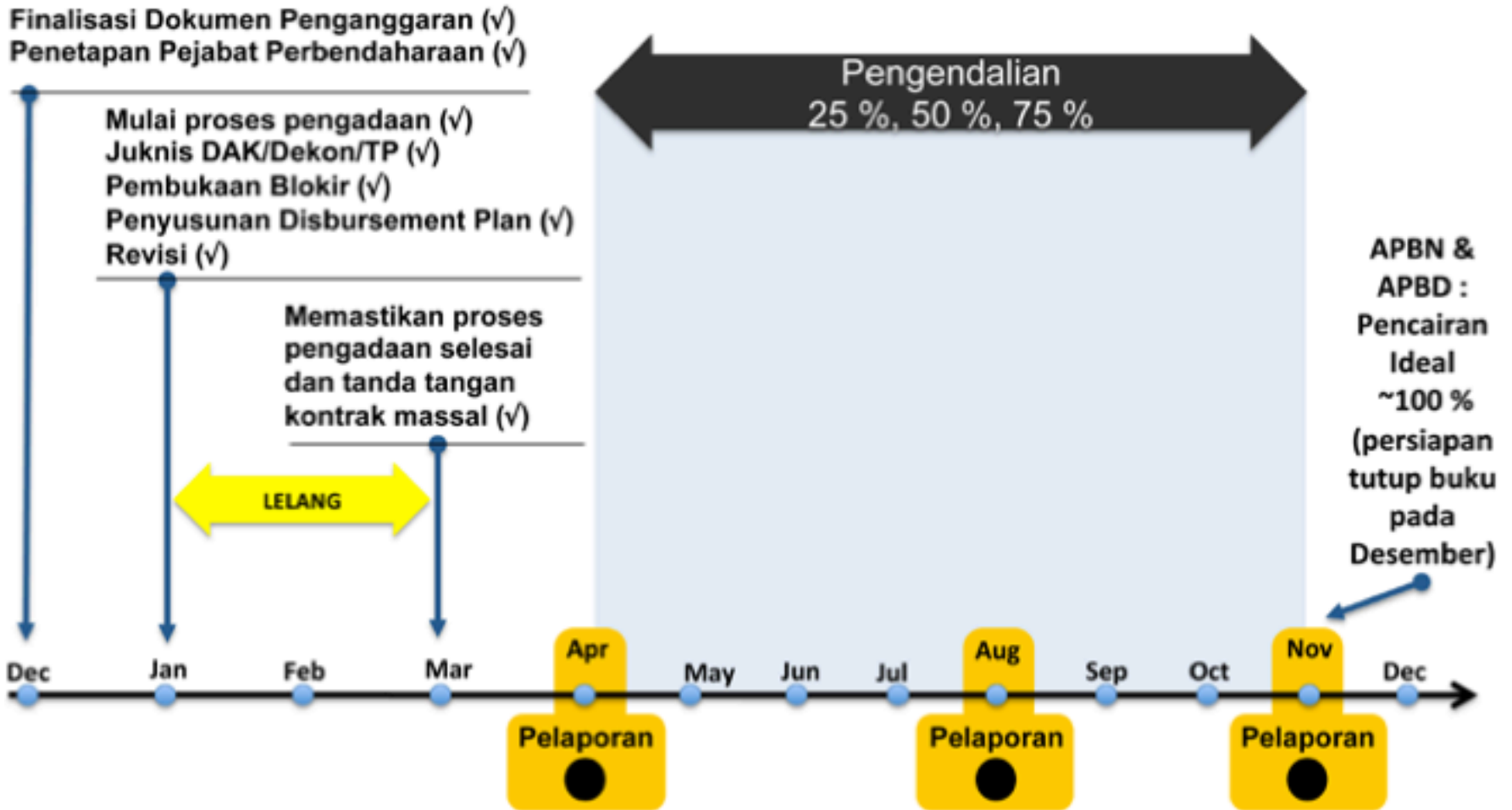
Source: CEIC, World Bank

# Serapan anggaran 2011



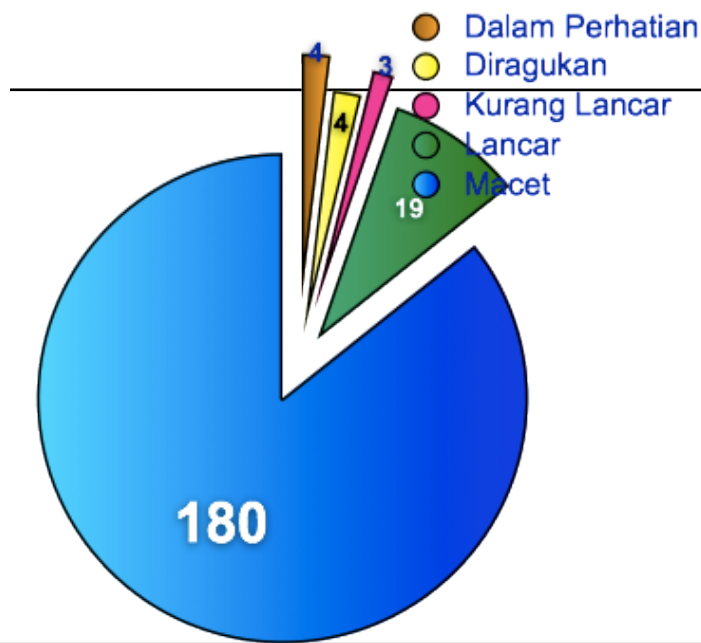
- **Presiden tidak senang** dengan prestasi serapan yang terendah dalam 3 tahun
  - (2009 : 91,8 %)
  - (2010 : 90,9 %)
  - (2011 : 87,0 %)
- Sebesar 270 Triliun terserap hanya di 1 bulan (Desember)
- Terlihat bahwa di Q1 birokrasi belum berbuat banyak selain administrasi gaji

# Apakah kebijakan *debottlenecking* th 2012 akan efektif?

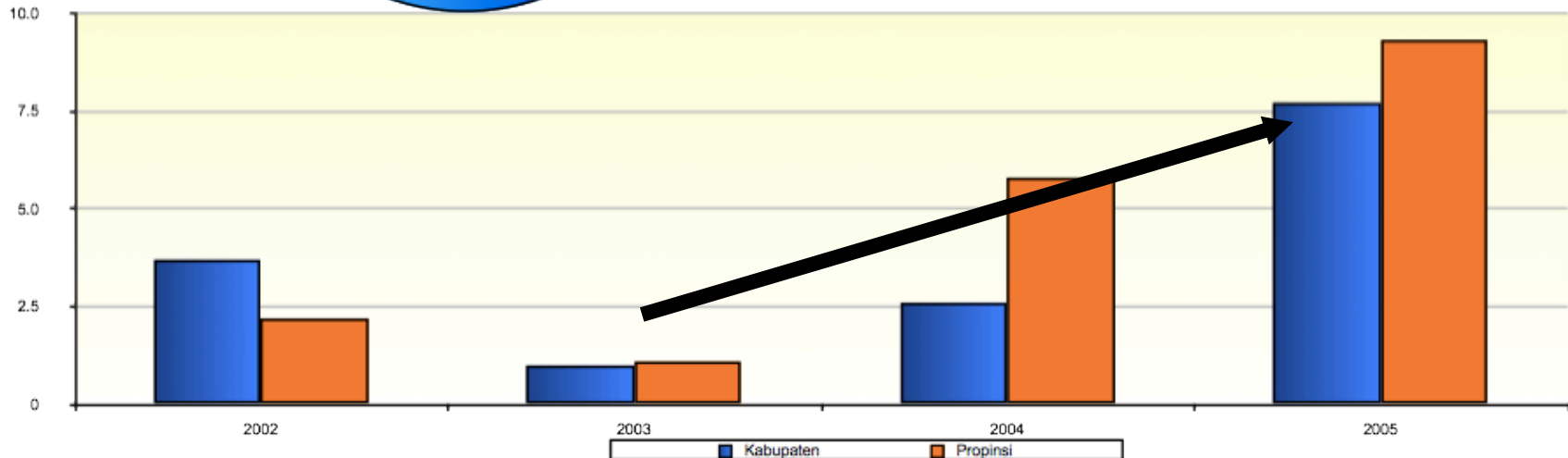
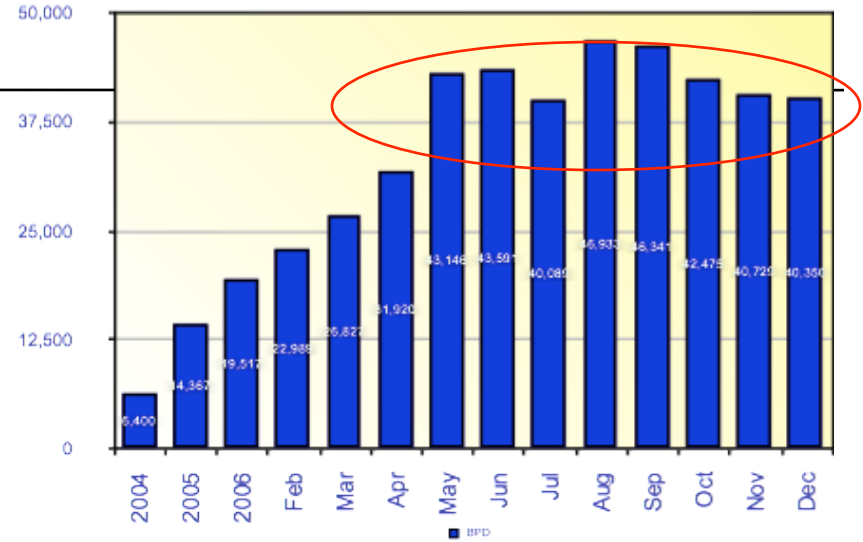


# Surplus dana APBD di Daerah lebih banyak masuk SBI, bukan untuk investasi...

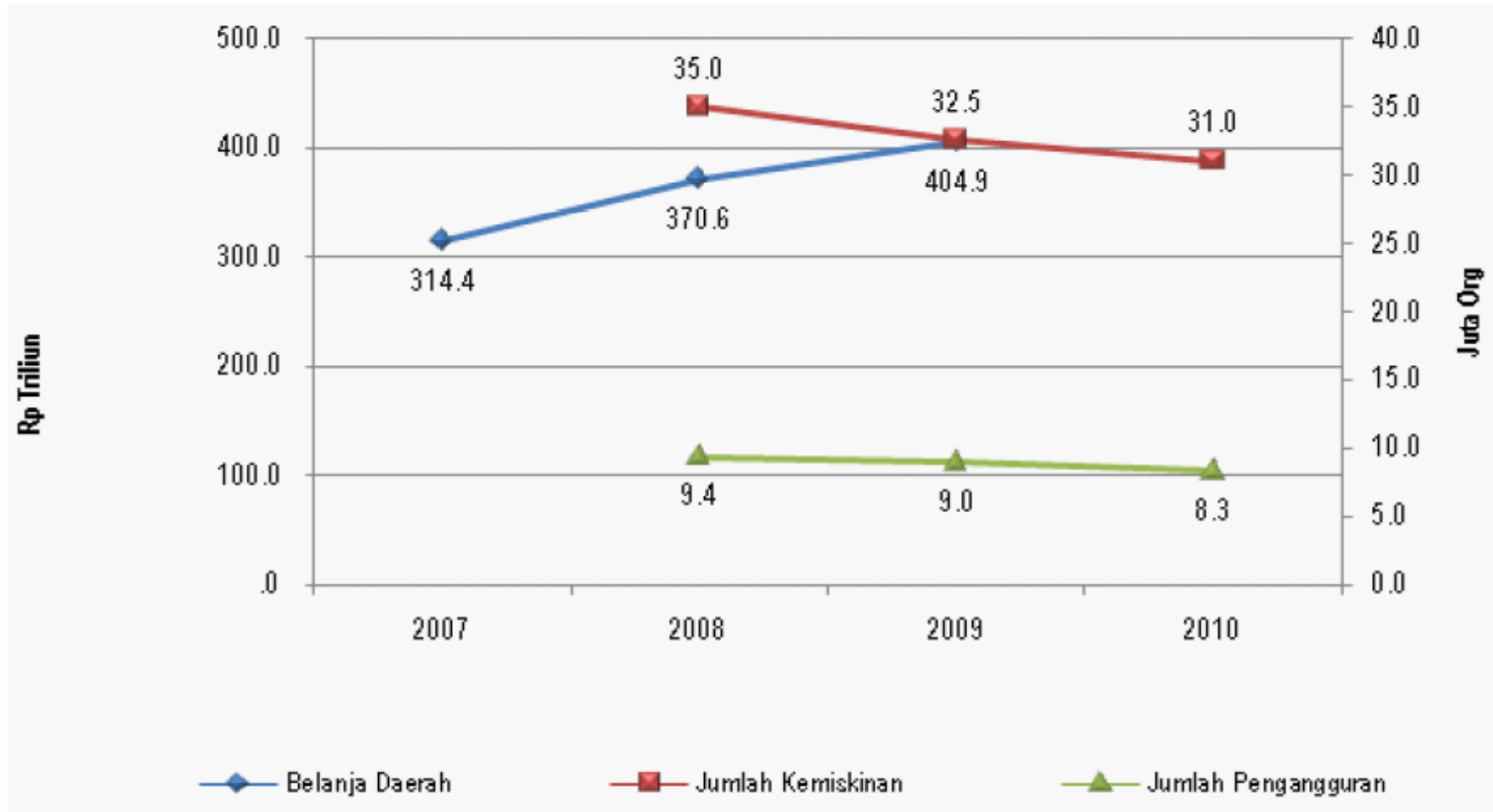
Jumlah PDAM per Status Kredit



Nilai Pemilikan SBI 1 Bulan dari BPD



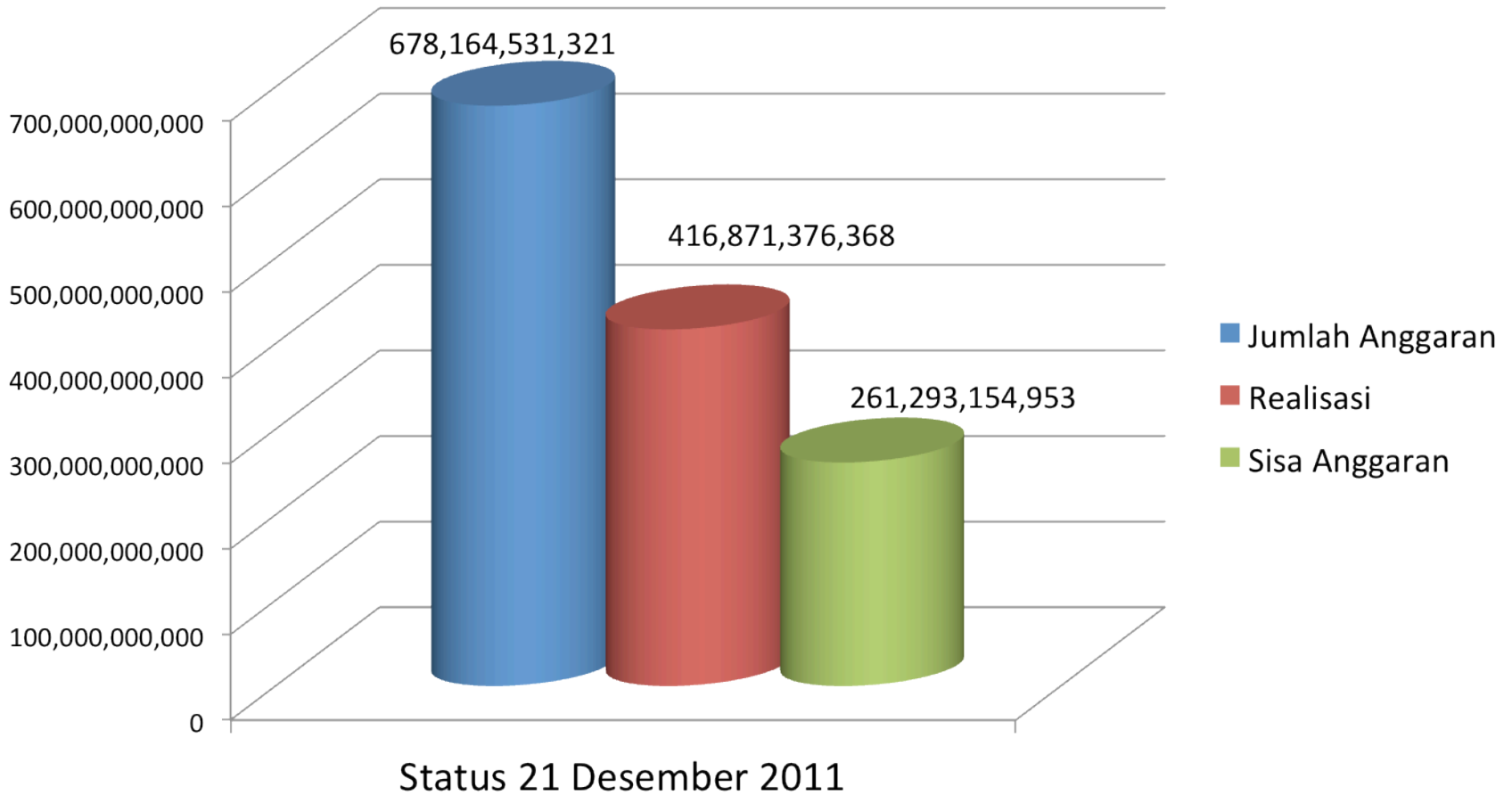
Apakah politisi dan pejabat tidak paham hal sederhana ini?



Korelasi Belanja Daerah dg Kemiskinan & Pengangguran

Sumber: DJPK, Kemkeu, 2011

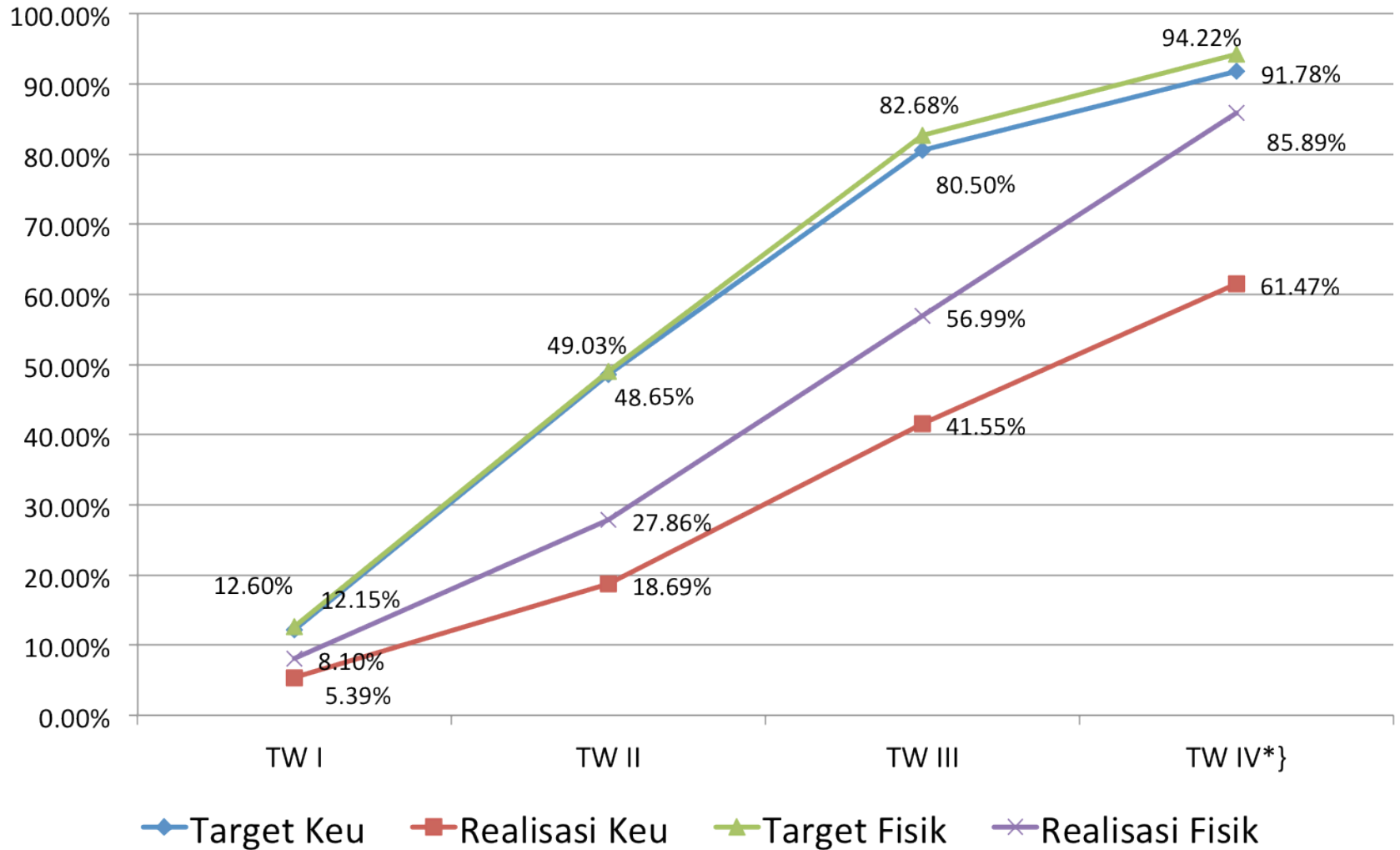
# Realisasi belanja APBD sangat rendah (Contoh kasus Pemprov DIY)



Sumber Data : [http://intranet.jogjakarta.go.id/monev\\_apbd](http://intranet.jogjakarta.go.id/monev_apbd)



# Kesenjangan antara Target & Realisasi Makin Lebar



# Alokasi Belanja di Daerah Kurang Efektif

Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	% Penyelesaian Kegiatan		
		TW 1	TW 2	TW 3
215	1283	0,25	3,10	11,05
		(3 kegiatan)	(41 kegiatan)	(142 kegiatan)

Catatan Tim Monev Pemprov DIY :

1. Deviasi antara target dan realisasi (fisik & keuangan) sangat lebar, deviasi keuangan tertinggi 38,95%, Deviasi Fisik tertinggi 25,69% yang keduanya terjadi pada Triwulan III.
2. Pada Triwulan 4 harus menyelesaikan 1141 kegiatan
3. Kondisi yang demikian apakah sudah cukup baik dari sisi perencanaan?

## PA/KPA dengan Deviasi Keuangan $\geq$ 40%

No.	Urusan / Pemerintahan / SKPD	Keuangan (%)			Fisik (%)		
		Target	Realisasi	Deviasi	Target	Realisasi	Deviasi
1	Sekretariat DPRD	99,43	59,18	40,25	99,27	67,1	32,17
2	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	90,23	45,42	44,81	98,5	92,98	5,52
3	Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Yogyakarta	96,89	49,26	47,63	97,23	65,59	31,64
4	Pelabuhan dan Perikanan Pantai	99,75	40,59	59,16	99,75	99,87	-0,12

# Kegiatan di 15 SKPD Terwujud (#1)

No.	Nama PA/KPA	Nama Kegiatan / Sub Kegiatan	Keterangan
1	DPPKA	Pembebasan tanah eks Bioskop Indra	proses negosiasi belum selesai
2	Dinas Pertanian	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional *	Bea Balik Nama Kendaraan dari Pusat/ Kementrian tidak direalisasikan
3	BPBPTDK Dinas Pertanian	Pengadaan Reservoir Ngipiksari	Sumber air tertutup erupsi merapi
4	BPPTPH Dinas Pertanian	Pengadaan Proktor Padi UPT	Terjadi kenaikan harga pasar
5	Dinas Pariwisata	Pameran CITM di China	Jadwal penyelenggaraan maju ijin dari Sekda tidak keluar
6	Dinas Pariwisata	Pemasangan iklan di majalah Malaysia	Dana tidak mencukupi

## Kegiatan di 15 SKPD Terwujud (#2)

No.	Nama PA/KPA	Nama Kegiatan / Sub Kegiatan	Keterangan
7	Dinas Kehutanan	Optimalisasi Tegakan kayu putih	target 522.000 baru terpenuhi 255.000 (bersertifikasi) proses pengadaan dilaksanakan oleh BP3KP terlambat.
8	Trans Jogja	Jalur 4 belum beroperasi	20 Bus masih plat merah
9	Badan Diklat	Diklat Prajab dari luar provinsi DIY 23 angkatan, tidak terealisasi 4 angkatan	Daerah di luar provinsi DIY memiliki kebijakan untuk melaksanakan diklat sendiri di daerah masing-masing
10	BP4	Pembangunan Rumah Sakit*	Terjadi kendala dalam negosiasi pembebasan tanah. tidak ada kesepakatan antara Bp4 dengan pemilik tanah tentang harga tanah
11	RS Grhasia	Akreditasi Rumah Sakit	Persyaratan belum lengkap (dilaksanakan 2012)

## Kegiatan di 15 SKPD Terwujud (#3)

No.	Nama PA/KPA	Nama Kegiatan / Sub Kegiatan	Keterangan
11	Dinas Nakertrans	Target 175 Transmigran tidak tercapai	2 lokasi gagal sebanyak 50 kk (Tanah Tidung Kaltim dan Sambas Kalbar)
12	Sekretariat DPRD	Pemeliharaan instalasi telpon	Dilaksanakan biro umum
13	BKPM	Pendampingan gubernur ke Chiang mai	Dilaksanakan Tahun 2012 karena Bencana Banjir di Thailand
14	BKPM	Kerjasama dengan St. Petersburg	belum disetujui oleh DPRD
15	Biro Tata Pemerintahan	Sosialisasi Peraturan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Rancangan Undang-undang Keistimewaan DIY masih dalam pembahasan di DPR RI.

# Catatan Umum Tim Monev Pemprov DIY 2012

1. Capaian Kinerja Keuangan dan Fisik sangat rendah apabila dibandingkan dengan target
2. Penyelesaian program/kegiatan cenderung “menumpuk” diakhir tahun, hal ini ditunjukkan dengan masih rendahnya tingkat penyelesaian kegiatan sampai triwulan 3
3. Perencanaan aliran Kas yang tidak sesuai dengan karakteristik kegiatan
4. ROPK belum digunakan secara efektif sebagai alat pengendalian.



# APBD Klaten 2011; Seberapa Besar Untuk Rakyat?

Uraian		Jumlah (jutaan rupiah)	% Total Belanja APBD
<b>Total Pendapatan</b>		1,218,358	93.73
	Pendapatan Asli Daerah	65,498	5.04
	Dana Perimbangan	917,298	70.57
	Pajak Daerah	24,561	1.89
	Retribusi Daerah	18,900	1.45
	Lain-lain Pendapatan	15,927	1.23
<b>Total Belanja</b>		1,299,874	<b>100.00</b>
Belanja Tidak Langsung		962,380	74.04
	Belanja pegawai	873,351	67.19
	Hibah	1,133	0.09
	Bantuan sosial	36,675	2.82
	Bantuan keuangan	44,595	3.43
	Belanja tidak terduga	4,801	0.37
Belanja Langsung		337,494	25.96
	Belanja pegawai	32,093	2.47
	Belanja barang & jasa	149,643	11.51
	Belanja modal	155,759	11.98
Pembiayaan Daerah		81,517	6.27
	SiLPA	72,294	5.56
	Pengeluaran	16,195	1.25
<b>Defisit</b>		(81,517)	-6.27

# Masalah Mendasar: Integritas dan Profesionalisme

1. Profesionalisme relatif mudah untuk dikembangkan. Tapi soal integritas pejabat publik perlu Reformasi Birokrasi yg mendasar, komitmen yg kuat, dan generasi baru birokrat yg bersih.
2. Persoalan integritas pejabat publik terjadi karena **budaya korup**: ingin kaya secara instan, sikap hidup menerabas, kecenderungan menyalahgunakan kewenangan, masyarakat yg permisif thd korupsi.
3. Reformasi birokrasi bukan sekadar penambahan remunerasi. Dalam banyak kasus, remunerasi tidak mencegah pegawai untuk korupsi.
4. Sanksi hukum yg berat dan konsisten bagi koruptor; Tindakan disiplin yg ketat bagi *under-performance* & sikap tidak profesional; Pencegahan (Mis: melawan budaya suap) adalah yg paling efektif dlm jangka panjang.

# Mengapa kita harus khawatir tentang integritas pejabat publik?

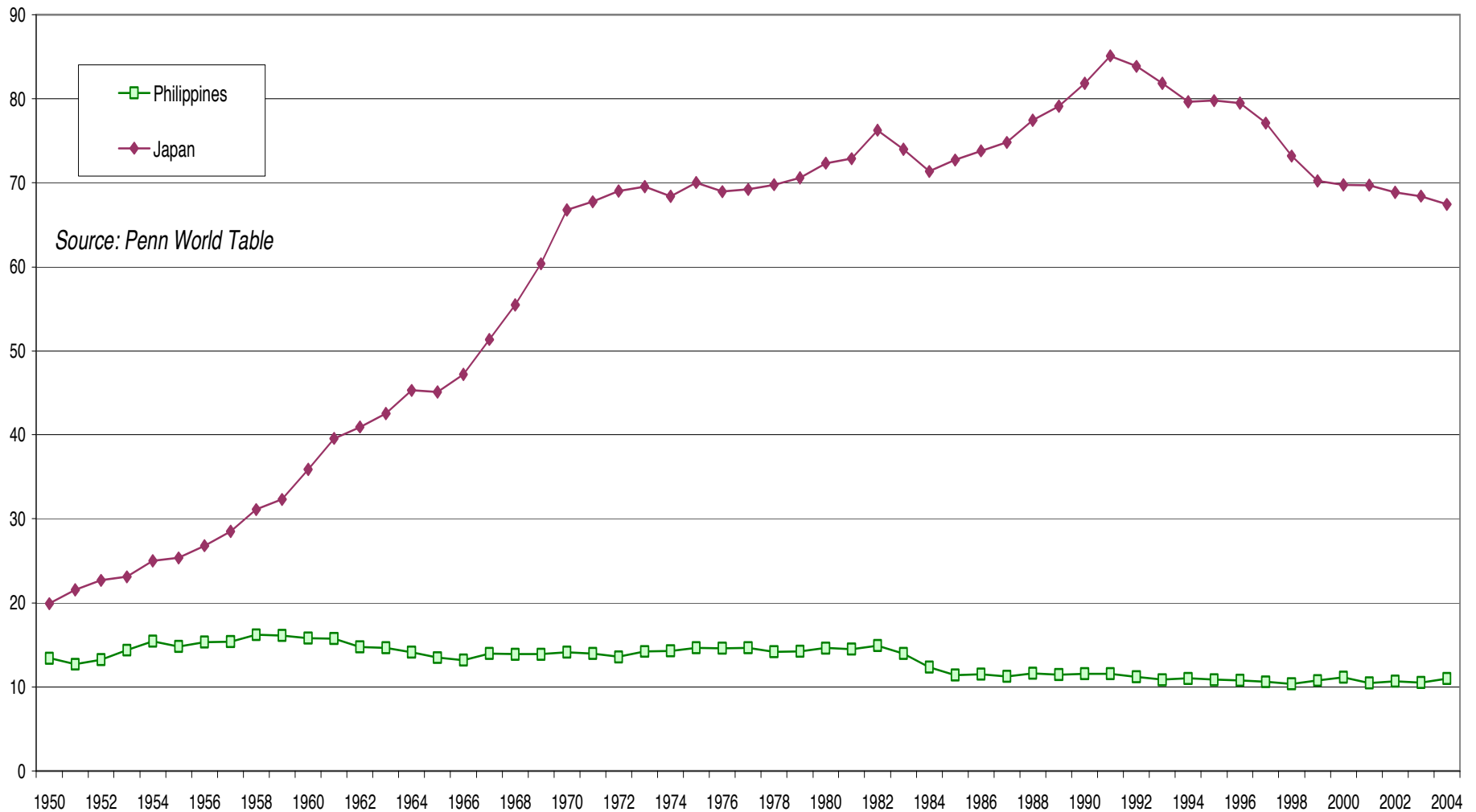


Figure 2B -- Japan & Philippines  
Real Per Capita GDP Relative to US (US=100)

# Kita tidak ingin menjadi bangsa yg gagal... Selanjutnya? Terserah Anda!

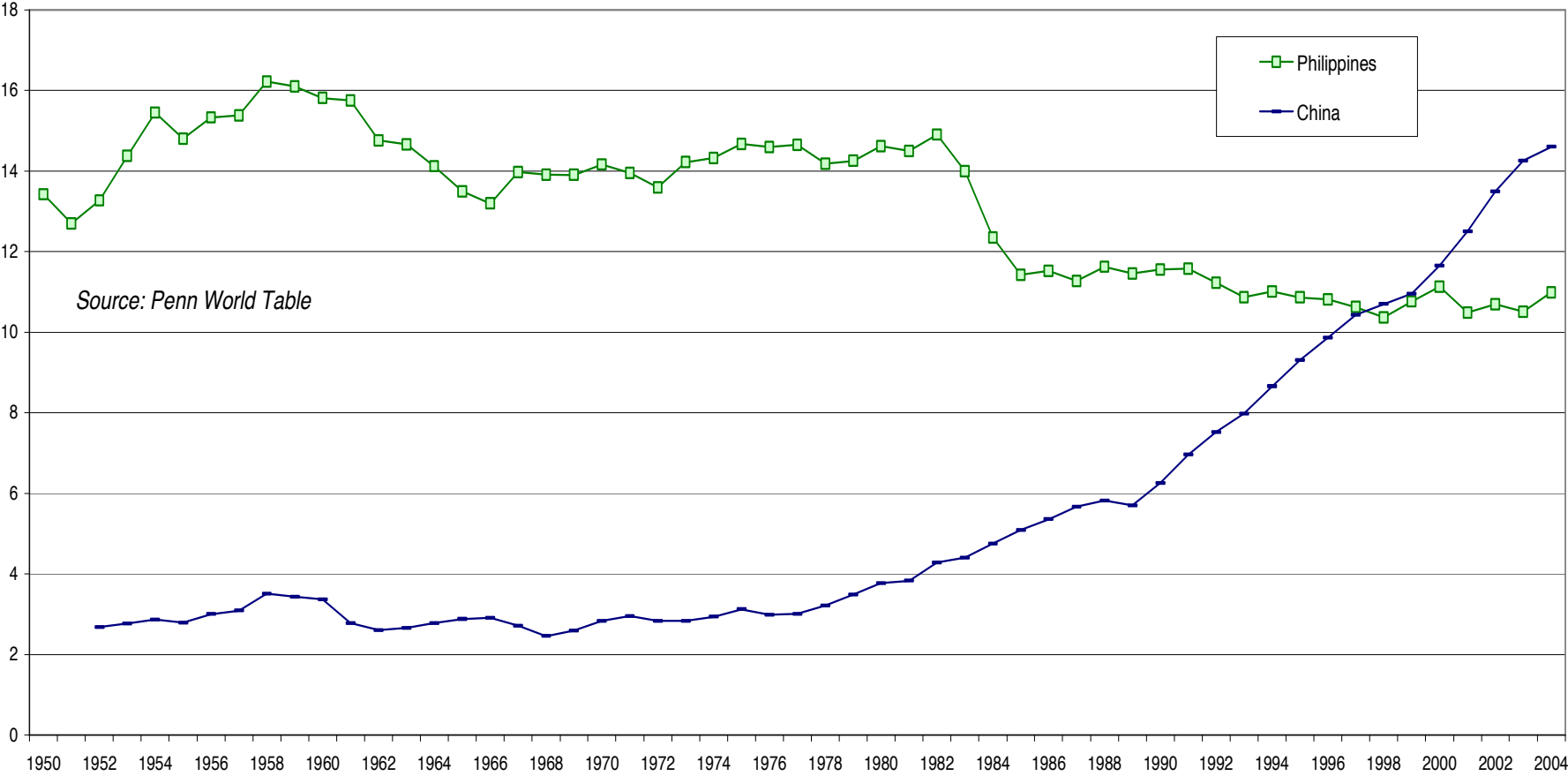


Figure 8B -- China & Philippines  
Real Per Capita GDP Relative to US (US=100)

Mahasiswa Fisipol akan menjadi penggerak utama politik dan birokrasi di masa depan.

Keberhasilan menuntaskan masalah anggaran dan birokrasi publik ada di tangan Anda!

**TERIMA KASIH**